

PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA SEMARANG, ANTARA CAPAIAN DAN TANTANGAN

Lilis Anisah

Fungsional Statistisi BPS Provinsi Jawa Tengah

Jurnal Ripstek

Volume 13 No. 1 (1 – 12)

Tersedia online di:

<http://ripteck.semarangkota.go.id>

Info Artikel:

Diterima: 3 Juli 2019

Disetujui: 31 Juli 2019

Tersedia online: 1 Agustus 2019

Kata Kunci:

Capaian; IPM; Tantangan

Korespondensi penulis:

lilis.anisah@bps.go.id

ABSTRAK Tulisan ini mengkaji mengenai ketercapaian dan tantangan pembangunan manusia Kota Semarang melalui beberapa indikator yang tersedia pada kurun waktu 2013-2017. Hasil kajian menyatakan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang cukup membanggakan. Sejak tahun 2015 IPM Kota Semarang melampaui indeks 80, tepatnya 80,23. Kondisi ini meningkatkan klasifikasi IPM Kota Semarang dari klasifikasi IPM kategori tinggi menjadi sangat tinggi. IPM Kota Semarang juga selalu melampaui IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Prestasi lainnya, IPM Kota Semarang menempati posisi tertinggi untuk wilayah Kabupaten Kota di Jawa Tengah sejak dua tahun terakhir. IPM Kota Semarang apabila dibandingkan dengan IPM Ibukota Provinsi lain di Pulau Jawa, hanya mampu dilampaui oleh Kota Yogyakarta semenjak tahun 2014. Kondisi demikian menjadi modal penting bagi Kota Semarang untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan pembangunan manusia di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi Kota Semarang terkait pembangunan manusia mencakup aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Selain memaparkan capaian pembangunan manusia, kajian ini secara deskriptif akan menggambarkan tantangan pembangunan manusia Kota Semarang berdasarkan indikator-indikator yang relevan terhadap ketiga aspek dimaksud. Data yang digunakan dalam kajian ini bersumber baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) maupun data Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kesemuanya menjadi pemacu bagi Kota Semarang untuk terus berbenah diri dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusianya.

ABSTRACT This paper studies the achievements and challenges of Semarang City's human development through several indicators available in the 2013-2017 period. The results show that the achievements of Semarang City HDI were quite encouraging. Since 2015 Semarang City HDI has exceeded index 80, precisely 80.23. This condition increases the classification of Semarang City HDI from the high category of HDI classification to the very high one. Semarang's HDI also always surpasses the Central Java and National HDI Provinces. Another achievement is that the Semarang City HDI occupies the highest position for the City Regency in Central Java in the last two years. Compared to the Provincial Capital in Java Island, the highest status of the Semarang City HDI has only been surpassed by Yogyakarta City since 2014. Such condition is an important capital for the Semarang City to face challenges in increasing the future human development.

Challenges faced by Semarang City related to human development include aspects of health, education and the economy. In addition to describing the achievements of human development, this study will descriptively depict the challenges of human development in Semarang City based on indicators that are relevant to those three aspects. The data used in this study are taken from Central Statistics Agency (BPS) in the form of National Socio-Economic Survey (Susenas) data, National Labor Force Survey (Sakernas) data and Semarang City Health Office data. All those data have speeded up the improvement of the human development quality in Semarang City.

Cara mengutip:

Anisah, Lilis. 2019. Pembangunan Manusia Kota Semarang, Antara Capaian dan Tantangan. *Jurnal Ripstek* Vol.13 (1) 1-12. URL

Pendahuluan

Menjadi manusia yang bermartabat, yaitu manusia yang dapat menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan produktif merupakan rekomendasi lembaga dunia *United Nations Development* (UNDP) yang seharusnya menjadi tujuan hakiki dari pembangunan sebuah negara (*Human Development Report 1990*). Oleh karena itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan ukuran yg hingga kini masih digunakan sebagai standar keberhasilan pembangunan manusia suatu wilayah.

Tiga aspek dasar manusia yaitu aspek kesehatan berupa umur panjang dan sehat, aspek pendidikan berupa pengetahuan dan aspek ekonomi berupa standar hidup yang layak merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Sedangkan tujuan ke delapan adalah

keberhasilan pembangunan manusia. Umur panjang dan sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir, aspek pendidikan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedangkan aspek ekonomi diwakili oleh pengeluaran per kapita. Ketiga aspek tersebut terangkum dalam suatu indeks pembentuk IPM.

Dalam skala global, isu pembangunan manusia merupakan isu yang menjadi perhatian dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tiga di antara 17 tujuan yang ingin dicapai dalam TPB terkait dengan pembangunan manusia yaitu tujuan ke tiga, ke empat dan ke delapan. Tujuan ke tiga adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Tujuan ke empat yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan

produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua (BPS, 2018).

Terdapat agenda prioritas pembangunan nasional terkait dengan pembangunan manusia Indonesia yang tercantum dalam Sembilan Agenda Prioritas Nasional (Nawacita) 2015-2019. Butir ke lima Nawacita menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Implementasi yang dilakukan dengan berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan yaitu dengan program Indonesia Pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera (Bappenas, 2014).

Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan manusia Kota Semarang dijabarkan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam fokus kerja yang disebut **HEBAT** untuk mencapai visi pembangunan Kota Semarang tahun 2016-2021 sebagai "Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera". **HEBAT** merupakan akronim dari **Healthiness**/ kesehatan, **Education**/ pendidikan, **Building**/ infrastruktur fisik, **Attitude** / perilaku dan **Trading**/ perdagangan (Pemerintah Kota Semarang, 2017). Menggunakan analisis statistik deskriptif, penelitian ini ingin mengkaji pencapaian dan tantangan pembangunan manusia Kota Semarang melalui beberapa indikator yang tersedia. Dengan mengetahui kondisi pembangunan manusia Kota Semarang, bagaimana pencapaiannya, tantangan apa saja yang harus dihadapi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran lebih spesifik dan memberi manfaat sebesar-besarnya terkait perencanaan dan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kota Semarang.

Metodologi

Tujuan utama pembangunan menurut *united nation development programme-undp* adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. ipm mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga aspek dasar untuk mengukur kualitas hidup manusia. tiga aspek dimaksud mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; dan kehidupan yang layak. angka harapan hidup waktu lahir (ahh) digunakan untuk mengukur aspek kesehatan. untuk mengukur aspek pengetahuan, digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah (rls) dan harapan lama sekolah (hls). sedangkan untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan

makanan yang diperoleh dari rata-rata besaran pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (<https://jateng.bps.go.id>).

AHH saat lahir dimaknai sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh dalam kehidupan seseorang sejak lahir. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Dapat diasumsikan, pada usia 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. HLS dinyatakan sebagai lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dapat dirasakan oleh anak pada usia tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas, mengikuti kebijakan program wajib belajar oleh pemerintah. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dengan 66 komoditas merupakan komoditas makanan dan 30 komoditas merupakan komoditas non makanan, dihitung dengan Metode Rao (<https://jateng.bps.go.id>).

Leedy and Ormrod (2005) menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan dalam suatu penelitian adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dari fenomena yang diamati atau melakukan eksplorasi kemungkinan hubungan dua atau lebih fenomena. Penelitian deskriptif menurut Kuncoro (2009) dapat memberikan gambaran pola-pola yang konsisten dalam data, sehingga hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. Dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang memadai sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji pencapaian dan tantangan pembangunan manusia Kota Semarang melalui beberapa indikator yang tersedia. Informasi tersebut diharapkan memberi manfaat bagi para pengambil keputusan dalam menentukan prioritas kebijakan terkait strategi pembangunan manusia Kota Semarang.

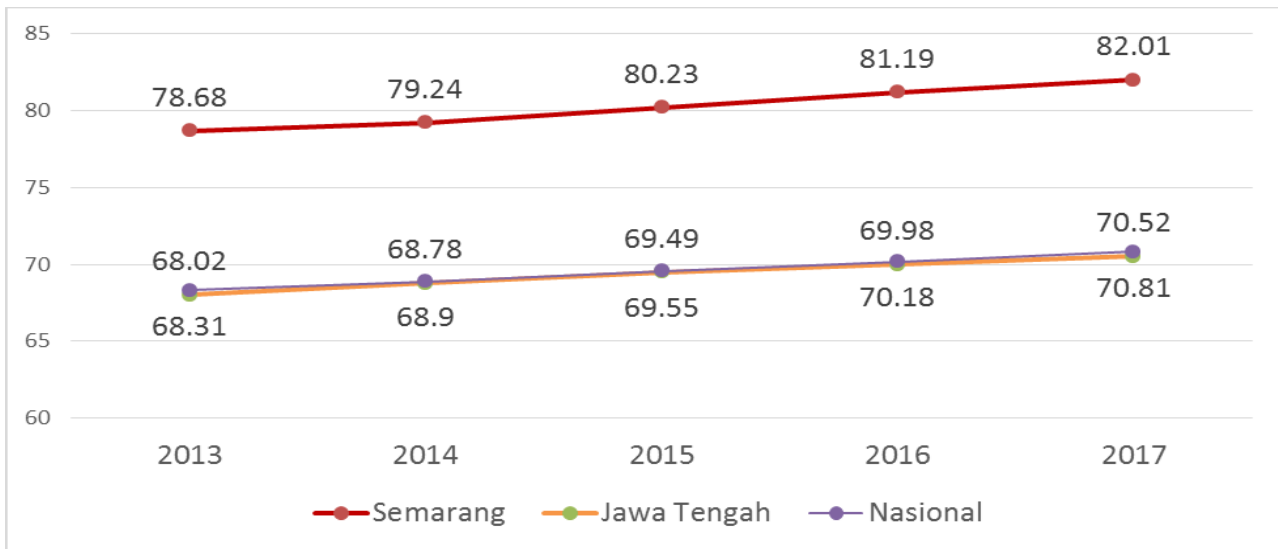
HASIL DAN PEMBAHASAN

Capaian Pembangunan Manusia Kota Semarang dalam Lima Tahun Terakhir. Capaian pembangunan manusia Kota Semarang diukur dari IPM kondisi lima tahun terakhir cukup membanggakan. IPM Kota Semarang telah melampaui indeks 80 tepatnya 80,23

sejak tahun 2015. Kondisi ini meningkatkan klasifikasi IPM Kota Semarang dari klasifikasi IPM kategori tinggi menjadi sangat tinggi. [Gambar 1](#) menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun IPM Kota Semarang selalu melampaui IPM Provinsi Jawa

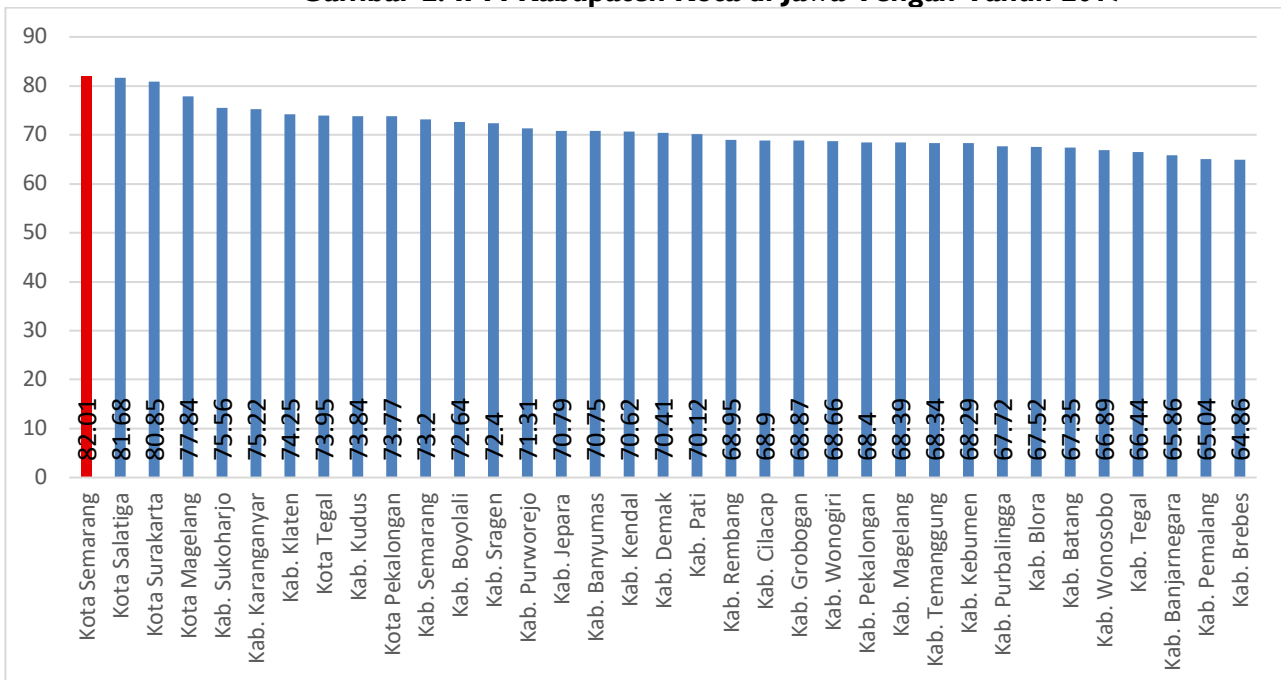
Tengah dan Nasional. IPM Provinsi Jawa Tengah sendiri baru di tahun 2017 mencapai kategori tinggi. Sedangkan IPM Nasionala telah beralih ke kategori tinggi sejak tahun 2016.

Gambar 1. Perbandingan IPM Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017



Sumber: 1. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
 1. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/10/17/25/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-2010-2017.html>, diolah

Gambar 2. IPM Kabupaten Kota di Jawa Tengah Tahun 2017



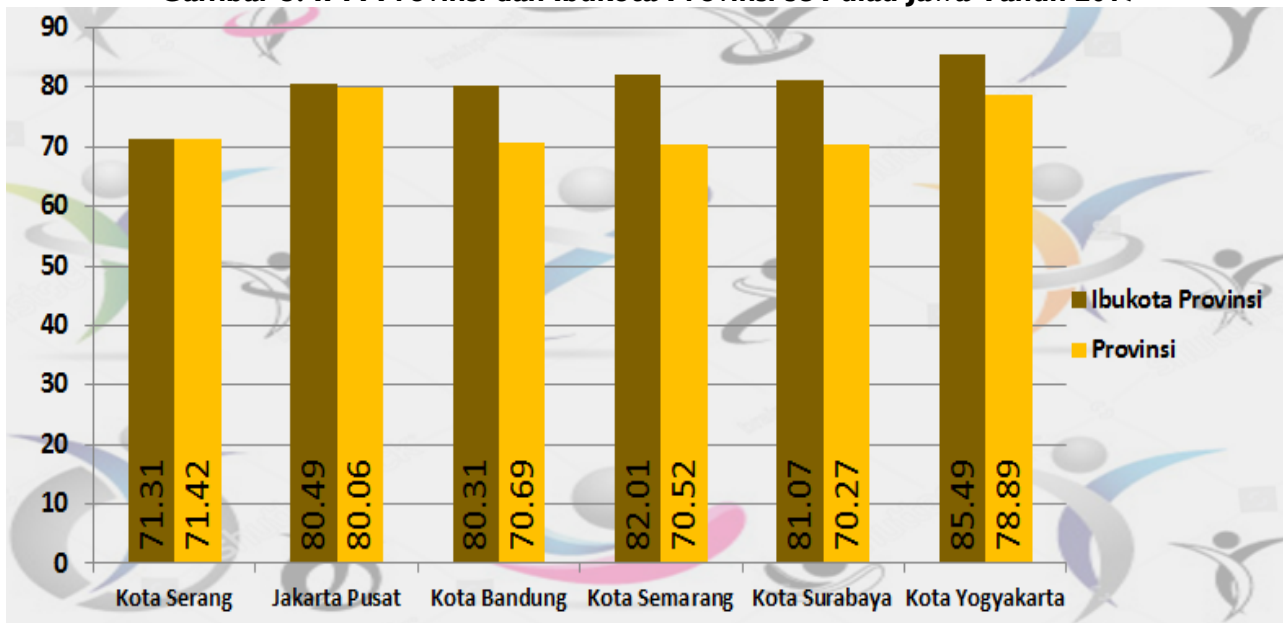
Sumber: <https://jateng.bps.go.id/site/resultTab>, diolah

Lebih membanggakan, pada 2016 dan 2017 IPM Kota Semarang menempati peringkat pertama dari seluruh Kabupaten Kota se Jawa Tengah maupun Provinsi Jawa Tengah. [Gambar 2](#) menunjukkan posisi IPM Kota Semarang di antara Kabupaten Kota se Jawa Tengah tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi maupun Ibukota Provinsi se Pulau Jawa, capaian IPM Kota Semarang tidak mengecewakan. Beranjak dari peringkat 3 pada 2013, IPM Kota Semarang meningkat menempati posisi ke dua setelah Kota Yogyakarta sejak 2014 hingga 2017 (lihat [Gambar 3](#)).

Perkembangan IPM dari tahun ke tahun sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang menyusunnya. Kemajuan IPM sangat tergantung

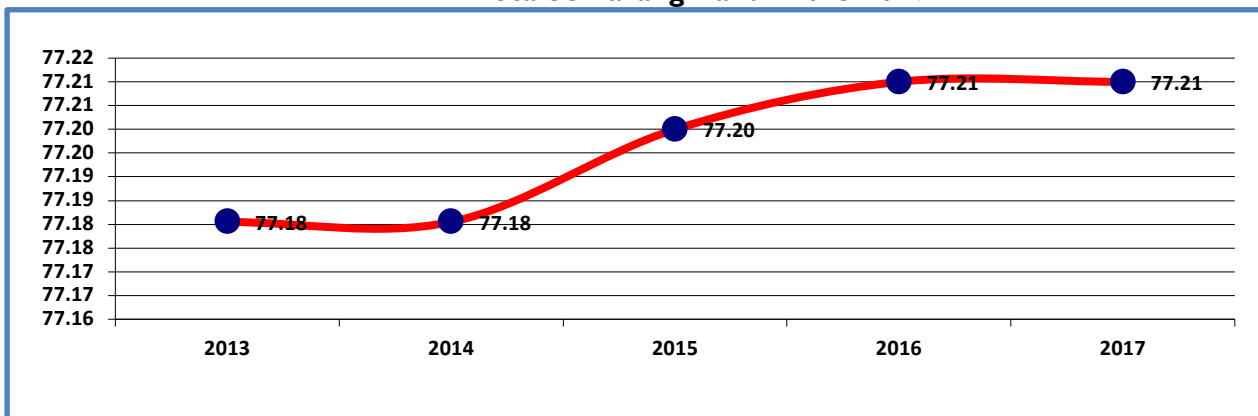
pada komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Perkembangan komponen kesehatan digambarkan dengan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan. [Gambar 4](#) menunjukkan bahwa secara umum peningkatan pencapaian AHH dalam kurun waktu 5 tahun

Gambar 3. IPM Provinsi dan Ibukota Provinsi se Pulau Jawa Tahun 2017



Sumber: 1. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
 2. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1297/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2017-metode-baru-.html>, diolah

Gambar 4. Perkembangan Komponen Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Semarang Tahun 2013-2017



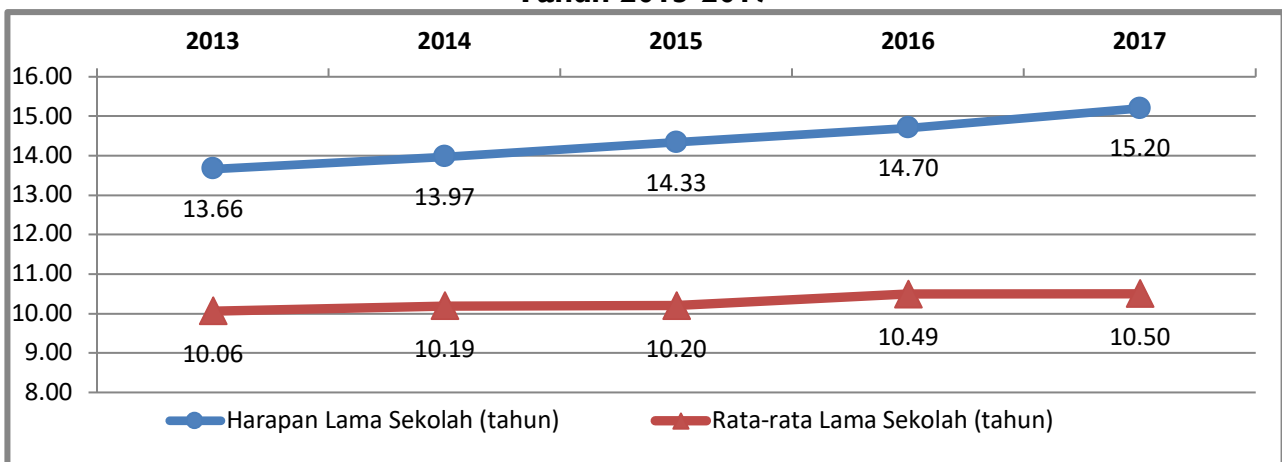
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2017

menunjukkan tren membaik, atau dapat diartikan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kota Semarang semakin berkualitas. AHH sebesar 77,21 pada tahun 2016 dan 2017 memberi makna bahwa secara rata-rata, bayi yang baru lahir di Kota Semarang pada tahun 2016 dan 2017 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 77,21 tahun. Harapan dan realita merupakan hal yang ingin dilihat pada angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Sekolah (RLS). HLS menjelaskan harapan capaian yang ingin diraih terhadap penduduk yang baru menginjakkan kaki pada jenjang sekolah dasar sedangkan RLS merupakan cerminan/hasil pola pendidikan yang telah diterapkan. Nilai RLS pada tahun 2017 tercatat 10,50 menjelaskan bahwa secara rata-rata, penduduk Kota Semarang usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,50 tahun atau hampir menamatkan kelas II (kelas 2

SMA/MA). Sedangkan Nilai HLS mencapai 15,20 menjelaskan bahwa anak-anak Kota Semarang yang baru menginjakkan kaki di bangku Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2017 memiliki peluang untuk terus bersekolah selama 15,20 tahun atau setara dengan diploma 3 atau jenjang Perguruan Tinggi pada semester 6. Baik HLS maupun RLS memiliki pola membaik. dari tahun 2013 hingga tahun 2017, walaupun peningkatan RLS tidak sebaik HLS yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2 sampai 3 persen setiap tahunnya.

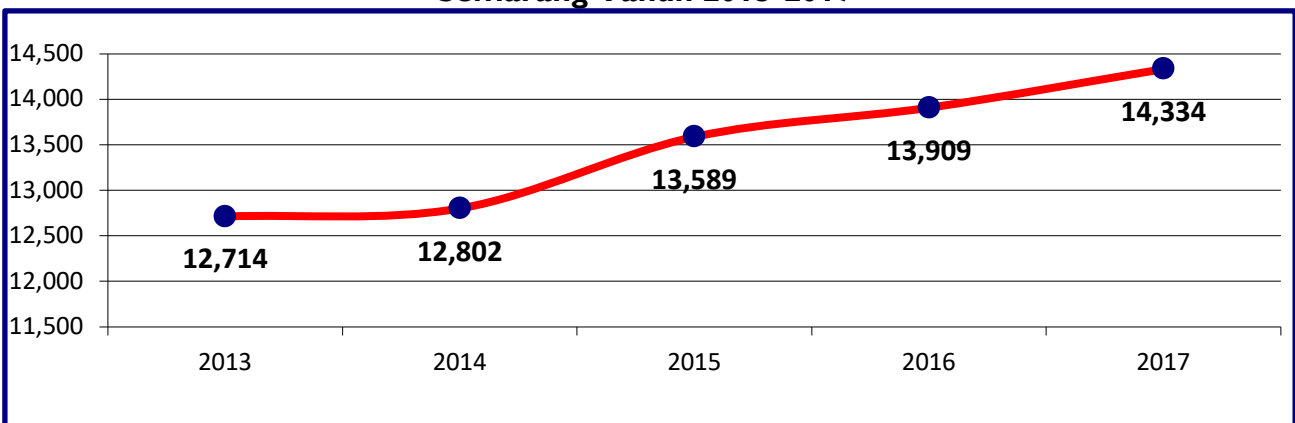
Komponen terakhir yang digunakan untuk penghitungan IPM adalah dimensi ekonomi yaitu kemampuan untuk hidup layak. Komponen ini digambarkan dengan pengeluaran per kapita disesuaikan atau paritas daya beli. Pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Semarang tahun 2017

Gambar 5. Perkembangan Komponen Penyusun Indeks Pendidikan Kota Semarang Tahun 2013-2017



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017

Gambar 6. Perkembangan Komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kota Semarang Tahun 2013-2017



Sumber: Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2017

sebesar Rp.14.334.000,- meningkat seiring dengan semakin tingginya kebutuhan hidup dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 13.909.000,-.

Peningkatan pengeluaran per kapita disesuaikan Kota Semarang menggambarkan semakin membaiknya kondisi ekonomi penduduknya. Dengan kata lain kondisi tersebut mencerminkan semakin banyak dan beragam barang/jasa yang dapat di beli oleh masyarakat Kota Semarang termasuk dalam hal mengakses pendidikan untuk melanjutkan sekolah dan mengakses fasilitas kesehatan menjadi semakin baik. Keseluruhan kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Kota Semarang untuk menghadapi tantangan dalam peningkatan pembangunan manusia di masa mendatang.

Tantangan Pembangunan Manusia Kota Semarang

IPM merupakan suatu besaran indeks komposit yang dibangun dari berbagai indikator tunggal di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Tabel 1 akan memaparkan tantangan pembangunan manusia di Kota Semarang yang mencakup berbagai bidang pembangunan, khususnya yang terkait langsung maupun tak langsung dengan komponen pembentuk IPM.

Dari sisi kesehatan, beberapa indikator yang berkaitan dengan komponen AHH antara lain: persentase rumah tangga yang menggunakan jamban, persentase peran aktif masyarakat dalam posyandu, persentase lamanya bayi diberi ASI eksklusif, persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis, persentase pemberian imunisasi lengkap dan persentase kepadatan penduduk (Aulele, SN et al, 2017).

Hasil penelitian Sugiantari dan Budiantara (2013) menyatakan bahwa angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi AHH di Jawa Timur. Bersumber pada publikasi BPS maupun Dinas Kesehatan Kota Semarang, tantangan pembangunan manusia Kota Semarang dari aspek kesehatan melalui beberapa indikator yang relevan dengan AHH dirangkum dalam tabel 1.

Persentase pemberian ASI bagi anak usia kurang dari 2 tahun (baduta) di Kota Semarang sebesar 98,74 persen menunjukkan kondisi pemenuhan ASI untuk baduta telah sangat baik. Namun di sisi lain, hasil Susenas 2017 menunjukkan masih terdapat 1,26 persen baduta belum pernah mendapatkan ASI. Seperti diketahui bersama, kelengkapan kandungan gizi pada ASI tiada bandingnya dan sangat diperlukan bagi baduta. Pola dan lama pemberian ASI akan berpengaruh positif terhadap kesehatan dan proses tumbuh kembang anak.

Seorang anak berhak mendapatkan ASI hingga usia dua tahun. Kondisi Kota Semarang menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Kota Semarang karena hasil Susenas 2017 menyatakan masih terdapat 8,43 persen baduta yang tidak lagi mendapatkan ASI. Pemberian ASI Eksklusif yang dianjurkan oleh pemerintah pun belum banyak direspon oleh masyarakat Kota Semarang ditunjukkan dengan kondisi masih terdapat 45,2 persen baduta Kota Semarang yang belum mendapatkan ASI Eksklusif. Upaya pemerintah yang gencar mensosialisasikan pentingnya pemberian imunisasi masih belum menyentuh 1,91 persen balita di Kota Semarang.

Tabel 1. Tantangan Pembangunan Manusia Kota Semarang Bidang Kesehatan

Nomor	Tantangan Bidang Kesehatan	Kondisi
1	Baduta belum pernah mendapatkan ASI*	1,26 %
2	Baduta tidak lagi mendapatkan ASI*	8,43%
3	Baduta tidak mendapatkan ASI Eksklusif*	45,2%
4	Balita belum tersentuh imunisasi*	1,91%
5	Penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau*	15,51%
6	Rumah tangga belum menggunakan sumber air minum bersih*	8,92%
7	Rumah tangga belum memiliki akses terhadap air minum layak*	8,92%
8	Rumah tangga belum memiliki akses terhadap sanitasi layak*	8,98%
9	Rumah tangga kumuh di daerah tempat tinggal*	1,4%
10	Rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar*	0,95%

Nomor	Tantangan Bidang Kesehatan	Kondisi
11	Usia Perkawinan Pertama (UPP) kurang dari 17 tahun pada wanita usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin*	6,85%
12	Jumlah kematian ibu hamil dan nifas tahun 2018**	19 kasus
13	Jumlah kematian bayi (0-11 bulan) tahun 2018**	160 kasus

Sumber Data: *= Data Susenas 2017

**= Paparan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Rapat Koordinasi Hasil Kajian Roadmap Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang, 17 Januari 2019

Meskipun bahaya zat nikotin dan tar yang terkandung dalam rokok telah diketahui, kebiasaan merokok telah menjadi hal umum di masyarakat. Penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau hasil Susenas 2017 di Kota Semarang sebesar 15,51 persen. Kebiasaan merokok yang merugikan kesehatan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat luas agar kesadaran penduduk akan bahaya rokok meningkat dan masyarakat dapat beralih ke gaya hidup yang lebih baik dan lebih sehat. Perlu untuk disadari bersama, bahwa semakin besar jumlah perokok, semakin meningkat pula masyarakat yang terpapar asap rokok. Mereka yang terpapar oleh asap rokok disebut sebagai perokok pasif. Perokok aktif maupun pasif akan terkena dampak negatif yang beresiko menimbulkan gangguan kesehatan yang berpotensi menurunkan AHH Kota Semarang.

Rumah dikatakan kumuh jika rumah tangga tidak memiliki akses air minum layak, akses sanitasi layak, ruang huni yang cukup (*sufficient living area*) dan bangunan tempat tinggal yang kokoh (Profil Kesehatan Kota Semarang 2017). Daerah tempat tinggal di Kota Semarang masih memiliki 1,40 persen rumah tangga kumuh dengan 8,92 persen rumah tangga yang belum menggunakan sumber air minum bersih dan belum memiliki akses terhadap air minum layak.

Sebesar 8,98 persen rumah tangga di Kota Semarang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan 0,95 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 mensyaratkan usia minimal 16 tahun bagi perempuan yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak mensyaratkan usia minimal perkawinan adalah 18 tahun. Sementara menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia 21-25 tahun merupakan usia perkawinan pertama yang ideal. Pada 2017 di Kota Semarang terdapat 6,85% perempuan usia 10 tahun ke atas dengan status pernah kawin, yang mengalami pernikahan dini (kurang dari 17 tahun). Kondisi tersebut patut menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang. Pernikahan yang terjadi pada usia dini selain berpotensi meningkatkan jumlah kelahiran juga beresiko terhadap kondisi kesehatan dan psikologis wanita (Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2017). Meskipun telah melampaui target, data bersumber dari Dinas Kesehatan Kota Semarang menyatakan bahwa masih terdapat 19 kasus kematian ibu hamil dan nifas dan 160 kasus kematian bayi (0-11 bulan) tahun 2018 yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk terus diminimalisir.

Tabel 2. Tantangan Pembangunan Manusia Kota Semarang Bidang Pendidikan

Nomor	Tantangan Bidang Pendidikan	Kondisi
1	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah*	2,71%
2	Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD/MI*	14,33%
3	Penduduk usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah lagi*	23,88%
4	Penduduk usia 19-24 tahun yang tidak bersekolah lagi*	46,37%
5	Angkatan Kerja usia 15-19 tahun**	5,06%
6	Pekerja usia 15-19 tahun**	3,82%

Sumber Data: *= Data Susenas 2017

**= Data Sakernas 2017

Tantangan pembangunan manusia Kota Semarang di bidang pendidikan dapat dicermati dari hasil Susenas 2017. Masih terdapat 2,71 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang yang tidak/belum pernah sekolah dan 14,33 persen

yang tidak tamat SD/MI. Partisipasi sekolah pada SD dan SMP sangat tinggi, bahkan mencapai 100 persen pada jenjang SD. Namun tidak semua penduduk dapat menikmati pendidikan menengah atas. Masih terdapat 23,88 persen penduduk Kota Semarang

usia 16-18 tahun dan 46,37 persen penduduk Kota Semarang usia 19-24 tahun yang tidak bersekolah lagi. Mencermati dari sisi gender, partisipasi sekolah laki-laki pada kelompok usia 13-24 di Kota Semarang ternyata sedikit lebih kecil daripada perempuan. Hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2017 memberi fakta bahwa terdapat 5,09 persen angkatan kerja dan 3,82 persen pekerja yang berusia 15-19 tahun padahal pada usia tersebut mereka seharusnya masih fokus di bangku sekolah. Dari sisi ekonomi, indikator rasio ketergantungan digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia tidak produktif. Rasio ketergantungan sebagai indikator demografi diturunkan dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Rasio ketergantungan digunakan dalam penelitian Nurkholis (2018) sebagai salah satu komponen dasar untuk mengevaluasi SDM Provinsi Bengkulu. Zuhairroh (2018) meneliti pengaruh rasio ketergantungan, angka kematian bayi dan angka partisipasi murni terhadap IPM Provinsi Jawa Timur. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk yang belum/tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) dibanding dengan penduduk usia produktif (usia 15 – 64 tahun). Tabel 3 memperlihatkan bahwa rasio ketergantungan penduduk usia muda dan rasio ketergantungan total terus menurun, sebaliknya rasio ketergantungan penduduk usia lanjut terus meningkat. Kondisi tersebut memberi deskripsi bahwa penduduk Kota Semarang sedang mengalami transisi menuju penduduk tua. Dapat diartikan pula bahwa persentase penurunan rasio ketergantungan muda lebih besar daripada peningkatan rasio ketergantungan penduduk usia lanjut. Kondisi tersebut juga menggambarkan

bahwa bahwa penurunan rasio ketergantungan muda dari tahun ke tahun mampu menurunkan rasio ketergantungan total Kota Semarang. Dengan kata lain, kelompok usia muda memiliki kontribusi yang besar dalam menurunkan rasio ketergantungan total. Pada tahun 2018 terdapat 37,09 persen penduduk usia belum dan tidak produktif di Kota Semarang yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Apabila dicermati lebih mendalam, terdapat 7,56 persen penduduk usia tua (tidak produktif) dan 29,53 persen penduduk usia muda (belum produktif) menjadi tanggungan penduduk usia produktif Kota Semarang. Angka ini memberi makna bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak 37 penduduk usia tidak produktif, sebesar 29 diantaranya berasal dari kelompok usia muda dan 8 lainnya berasal dari kelompok usia lanjut.

Data rasio ketergantungan penduduk usia muda dan usia lanjut bermanfaat untuk mengetahui kelompok usia mana yang lebih bergantung kepada penduduk usia produktif, sehingga penetapan kebijakan dukungan sosial terhadap masing-masing kelompok dapat lebih terfokus dan tepat sasaran. Komposisi penduduk Kota Semarang menunjukkan bahwa kelompok usia muda lebih banyak bergantung kepada kelompok usia produktif. Dengan demikian kebutuhan dukungan sosial ekonomi sebaiknya lebih difokuskan kepada kelompok usia muda.

Rasio ketergantungan Kota Semarang yang kurang dari 45,4 menunjukkan bahwa Kota Semarang telah memasuki era bonus demografi. Bonus demografi menjadi tantangan tersendiri dalam menyiapkan penyerapan penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Dengan demikian, membangun manusia berkualitas sejak dini sangat diperlukan di era bonus demografi. Selain prioritas terhadap

Tabel 3. Rasio Ketergantungan Lansia, Muda dan Total Kota Semarang Tahun 2014-2018

Tahun	Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Lanjut	Rasio Ketergantungan Penduduk Usia Muda	Rasio Ketergantungan Total
2014	6.76	31.06	37.82
2015	6.93	30.65	37.58
2016	7.12	30.25	37.36
2017	7.32	29.87	37.19
2018	7.56	29.53	37.09

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/site/resultTab>, diolah

pembangunan manusia berkualitas, pada masa bonus demografi analisis terkait sektor ekonomi mana yang perlu dikembangkan agar tercapai pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan penyerapan tenaga kerja, menjadi hal penting bagi Kota Semarang.

Tantangan pembangunan manusia Kota Semarang di bidang ekonomi selain rasio ketergantungan, bonus demografi juga menghadapi kondisi TPT dan kemiskinan yang harus diantisipasi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, struktur ekonomi yang kurang seimbang serta kualitas pendidikan penduduk yang siap bekerja maupun pekerja yang minim merupakan fakta data yang terkait dengan kondisi perekonomian Kota Semarang. Tabel 4 menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari penduduk yang siap bekerja maupun pekerja Kota Semarang tahun 2017 merupakan

lulusan SMP ke bawah. Dapat dicermati pula bahwa pada 2017 Kota Semarang memiliki 17,48 persen pengangguran intelektual. Kondisi melambatnya pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dapat dijelaskan pada gambar 7 di atas. Terhitung sejak lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang selalu melampaui Provinsi Jawa Tengah bahkan Nasional.

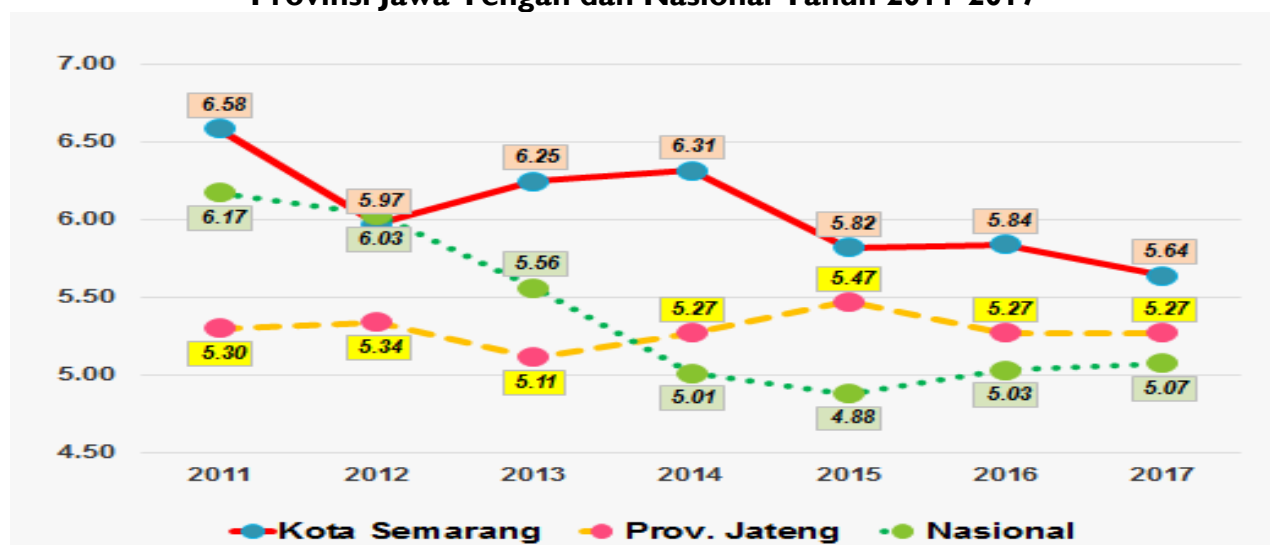
Kondisi ini sepatutnya perlu disikapi dengan sikap tidak berlebihan bahkan mawas diri karena jika dicermati dari tahun ke tahun fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Semarang menuju ke arah perlambatan. Kondisi ini didukung dengan struktur perekonomian yang kurang seimbang seperti deskripsi pada gambar 8 berikut.

Tabel 4. Tantangan Pembangunan Manusia Kota Semarang Bidang Ekonomi

Nomor	Tantangan Bidang Ekonomi	Kondisi
1	Rasio Ketergantungan 2018*	37,09%
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2017*	6,61%
3	Penduduk Miskin 2018*	4,14%
4	Pertumbuhan ekonomi*	Melambat
5		Kurang seimbang
6	Struktur ekonomi*	17,48%
7	TPT lulusan Diploma dan Universitas 2017**	34,77%
8	Angkatan Kerja lulusan SMP ke bawah 2017**	36,20%

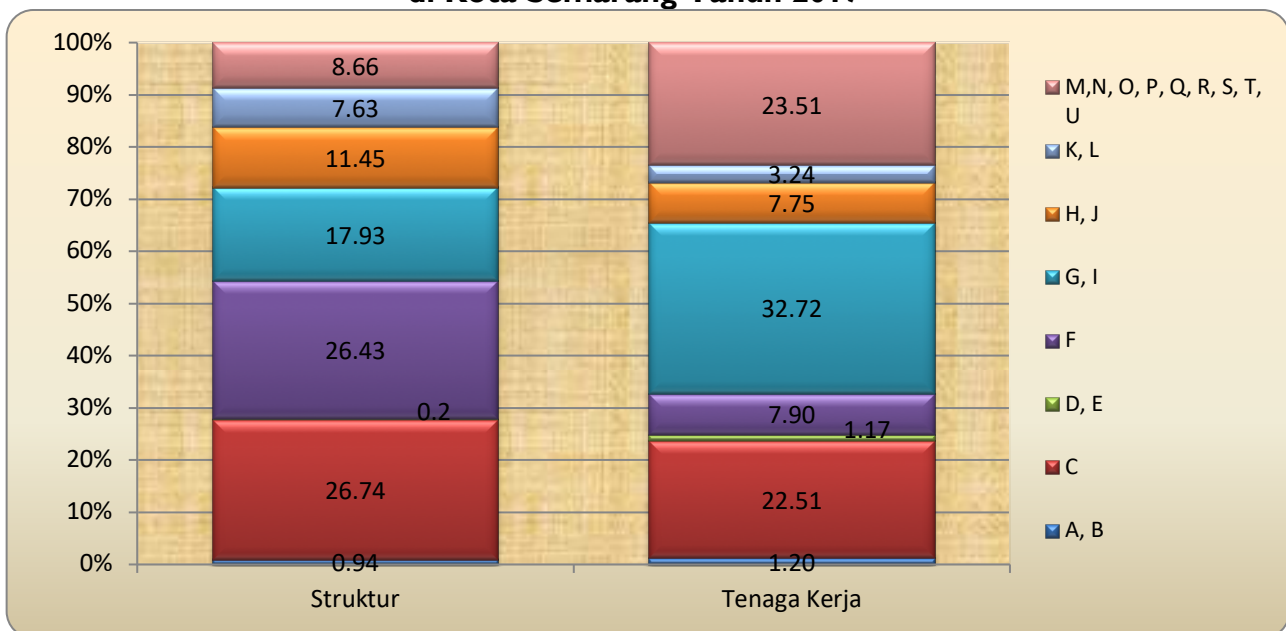
Sumber: *= <https://jateng.bps.go.id/site/resultTab>, diolah
 **= Data Sakernas 2017

Gambar 7. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2011-2017



Sumber: Bappeda Kota Semarang, Sosialisasi RAD dalam Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang, 5 November 2018

Gambar 8. Struktur Perekonomian dan Tenaga Kerja Terserap di Kota Semarang Tahun 2017



Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 dan Hasil Sakernas 2017, diolah

Gambar 8 memberikan penjelasan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara struktur ekonomi Kota Semarang dengan penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha tertentu. Lapangan usaha industri (kategori C), Konstruksi (F) serta Perdagangan dan Jasa Akomodasi (G dan I) merupakan penopang perekonomian Kota Semarang. Total ketiga kategori memberi kontribusi sebesar 71.1 persen dari keseluruhan nilai tambah perekonomian Kota Semarang. Di sisi lain, serapan tenaga kerja di Kota Semarang terbesar terdapat di sektor perdagangan, jasa dan industri.

Dapat dimaknai, besarnya tenaga kerja yang terserap di pasar kerja belum sejalan dengan kontribusinya dalam menciptakan nilai tambah di Kota Semarang. Semua kondisi tersebut sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengambil strategi dan kebijakan yang tepat dan terarah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusianya.

KESIMPULAN

Capaian pembangunan manusia Kota Semarang pada lima tahun terakhir cukup membanggakan. Menggunakan ukuran IPM, Kota Semarang menorehkan prestasi dengan capaian yang selalu melampaui IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Prestasi lain adalah kondisi IPM Kota Semarang yang menempati posisi tertinggi untuk wilayah Kabupaten Kota di Jawa Tengah sejak dua tahun terakhir. IPM Kota Semarang dengan status

sangat tinggi tersebut apabila dibandingkan dengan Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, hanya mampu dilampaui oleh Kota Yogyakarta semenjak tahun 2014.

Kondisi tersebut sepatutnya menjadikan Kota Semarang untuk tidak lekas berpuas diri. Terdapat beberapa tantangan baik dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang selayaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota Semarang untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pembangunan manusianya.

Terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangkan terkait peningkatan kualitas pembangunan manusia Kota Semarang:

1. Diperlukan investasi pendidikan dengan kompetensi keahlian memadai untuk dapat memenuhi pasar kerja.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima dan tata kelola.
3. Pemerintah yang bersih sebagai bentuk investasi penciptaan lapangan kerja.
4. Perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan serta kecukupan pangan dan gizi.
5. Kebijakan ekonomi yang kondusif untuk meningkatkan lapangan kerja.
6. Mengembalikan kelompok umur angkatan kerja termuda (usia 15-19 tahun) ke bangku sekolah melalui program wajib sekolah 12 tahun.
7. Mengembangkan produk unggulan yang berkontribusi nyata pada perekonomian

(PDRB) dan menyerap tenaga kerja untuk menjawab tantangan era bonus demografi.

8. Penerapan hidup sehat dengan memperhatikan pemenuhan fasilitas dasar terciptanya lingkungan dan gaya hidup sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulele, SN; Wattimena, AZ; Tahya, Christy. 2017. "Analisis Regresi Multivariat Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Maluku", *Barekeng Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*. Volume 11 Nomor 1: 39-48
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang. 2018. "Sosialisasi RAD dalam Pencapaian Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang", Semarang. 5 November 2018
- Badan Pusat Statistik. Januari 2019. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>. "Tabel Dinamis [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia"
- , Januari 2019. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>. "Tabel Dinamis [Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2017"
- , Januari 2019. <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/04/16/1297/indeks-pembangunan-manusia-menurut-kabupaten-kota-2017-metode-baru.html>. "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2017 (Metode Baru)"
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Januari 2019. <https://jateng.bps.go.id/dynamictable/2016/10/17/25/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia-jawa-tengah-menurut-kabupaten-kota-2010-2017.html>. "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2010-2017"
- , Januari 2019. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>. "Tabel Dinamis Jumlah Penduduk Kota Semarang menurut Kelompok Umur (Jiwa) Tahun 2014-2018"
- , Januari 2019. <https://www.bps.go.id/site/resultTab>. "Tabel Dinamis Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Semarang 2017"
- , Januari 2019. <https://jateng.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>. "Konsep Indeks Pembangunan Manusia"
- , 2018. *Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- , 2018. *Profil Kesehatan Jawa Tengah 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- , 2018. *Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- , 2018. *Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas 2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2018. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Semarang Menurut Lapangan Usaha 2013 – 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang
- , 2018. *Indeks Pembangunan Kota Semarang 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang
- , 2018. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2017*. Badan Pusat Statistik Kota Semarang
- Bappenas. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku I*. Jakarta: Bappenas
- , 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Buku II*. Jakarta: Bappenas
- Dinas Kesehatan Kota Semarang. 2018. "Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Semarang". Paparan Dinas Kesehatan Kota Semarang pada Rapat Koordinasi Hasil Kajian Roadmap Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Semarang, 17 Januari 2019

- Nurkholis, Afid. 2018. <https://osf.io/etm8r/download/?format=pdf>. (30 Januari 2019). "Evaluasi Kondisi Demografi Secara Temporal di Provinsi Bengkulu: Rasio Jenis Kelamin, Rasio Ketergantungan, Kepadatan Penduduk"
- Pemerintah Kota Semarang. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021*. Pemerintah Kota Semarang
- Sugiantari, AP dan Budiantara, IN. 2013. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Harapan Hidup di Jawa Timur Menggunakan Regresi Semiparametrik Spline". *Jurnal Sains dan Seni Pomits Volume 2 Nomor 1*: 2337-3520 (2301-928X Print)
- United Nations Development Programme. 1990. *Human Development Report*. New York: UNDP
- Yuwono, Margo. 2018. "Memetik Bonus Demografi menuju Indonesia Emas 2045". Paparan pada Seminar Hari Statistik Nasional. Jakarta
- Zuhairoh, ZA. 2018. "Pengaruh Angka Kematian Bayi, Angka Partisipasi Murni, Rasio Ketergantungan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Biometrika dan Kependudukan Vol. 7 No. 1*: 87-95